

**PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN
FUNGSIONARIS MUHAMMADIYAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana SI
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

RISKA WAHYUNI
NPM. 1531040053

Jurusan : Pemikiran Politik Islam



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2019 M

**PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN
FUNGSIONARIS MUHAMMADIYAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

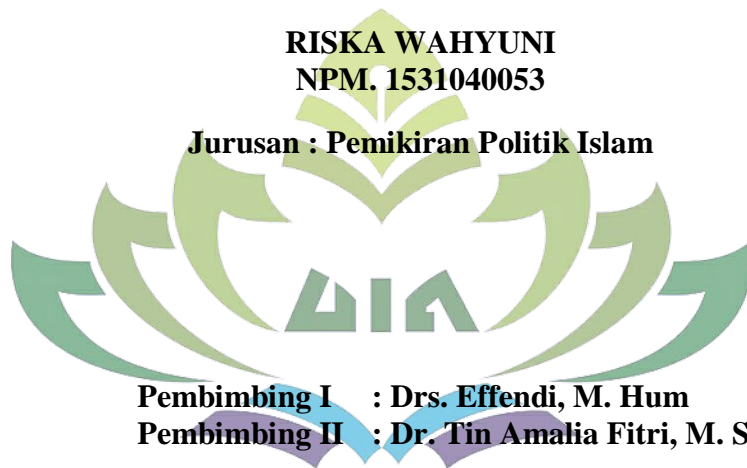
Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana SI
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

**RISKA WAHYUNI
NPM. 1531040053**

Jurusan : Pemikiran Politik Islam



**Pembimbing I : Drs. Effendi, M. Hum
Pembimbing II : Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

ABSTRAK

PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN FUNGSIONARIS MUHAMMADIYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Muhammadiyah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu organisasi yang tidak melarang warganya untuk terjun ke ranah politik termasuk kaum perempuan. Perempuan perlu hadir memberikan ruang dan peluang untuk berkiprah didalamnya serta telah ditetapkan bahwa dalam menduduki kursi parlemen atau partai politik diberikan hak sebesar 30% untuk kaum perempuan. Akan tetapi pada kenyataannya terjunnya perempuan ke ranah politik hanya sebagai formalitas guna memenuhi kuota 30%. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk bagaimana pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang peran politik perempuan dan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini berjumlah lima orang terdiri dari bapak Ujang Suparman ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, Bapak Ngatio Haryanto dan Bapak Mukadi Ida Setiawan wakil ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, Thabroni M. Zuhri sekretaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung dan bapak Gafri Gwang bendahara Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah peran politik perempuan dalam pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung sudah terlaksana dan memang seharusnya perempuan diikuti sertakan keranah politik. Dengan melibatkan perempuan keranah politik dapat mewakili kaum perempuan supaya aspirasi-aspirasi dan hak-hak perempuan dapat terwujud serta dapat menciptakan kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang mampu berkiprah di ruang publik. Hanya saja terdapat beberapa kendala seperti perempuan harus dapat membagi perannya di ruang domestik (Ibu Rumah Tangga) dan di ruang publik agar tetap terjaga baik tanpa terjadi konflik peran diantara keduanya. Bentuk partisipasi politik perempuan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung aktif di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan namun di dalam menduduki kursi parlemen atau partai politik dengan diberikannya kuota sebesar 30% masih perlu ditingkatkan lagi peran serta perempuan di ranah politik.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Wahyuni

NPM : 1531040053

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Peran Politik Perempuan Dalam Pandangan Fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun mengambil dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak di inginkan saya bertanggung jawab.

Bandar Lampung,

Yang membuat pernyataan

Riska Wahyuni



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarama Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN
FUNGSIONARIS MUHAMMADIYAH KOTA BANDAR
LAMPUNG**
Nama : Riska Wahyuni
NPM : 1531040053
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Effendi, M.Hum
NIP. 197406282008011013

Pembimbing II

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004

Mengetahui

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukaramé I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN FUNGSIONARIS MUHAMMADIYAH KOTA BANDAR LAMPUNG”** Disusun oleh, **RISKA WAHYUNI, NPM : 1531040053**, Program Studi : **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis/10 Oktober 2019

TIM/DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Malik Ghozali, M.A.

Sekretaris : Eska Prawisudawati Ulpa, M.Si

Pembahas Utama : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

Penguji Pendamping I : Drs. Effendi, M.Hum

Penguji Pendamping II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama



Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag

NPM : 196003131989031004

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(Q.S. Al-Hujurat : 13) ¹*



¹*Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015, h. 517.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai cinta kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Terima kasih teruntuk kedua orang tuaku papa Basri dan mama Jumani orang yang paling terhebat, teristimewa dan berjasa di kehidupanku, orang yang selalu tidak pantang menyerah dan ikhlas dalam memberikan doa, bantuan, kasih sayang, semangat, dukungan, kesabaran, pengorbanan serta selalu memberikan inspirasi dan motivasi di setiap langkah perjalanan penulis dalam menuntut ilmu.
2. Terima kasih kepada kakekku Amirul dan nenekku Yunita yang telah menjadi orang tua keduaku selama perantauan dan selalu mendukung sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada kakakku tercinta Novita Oktriantika, Adikku tersayang Aditya Pebriansyah dan Muhammad Syarief Hidayatullah serta Sekeluarga besar H. Zaini dan Hj. Siti Fatmah yang mampu menjadikan tempat untuk canda tawa.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama lengkap Riska Wahyuni merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari bapak Basri dan Ibu Jumani. Lahir di Kota Lubuklinggau, pada tanggal 13 Juli 1997.

Pendidikan yang penulis tempuh di mulai Pada Tahun 2003 penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di Tk Aisyiyah busthanul athfal 6 Prumnas nikan Kota Lubuklinggau. Lanjut di Tahun 2003 penulis mengenyam pendidikan dasar di Sd negeri 47 Prumnas lestari Kota Lubuklinggau lalu pindah pada tahun 2006 di Sd negeri 46 Majapahit Kota Lubuklinggau lulus di tahun 2009. Lanjut penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di Smp negeri 2 Kota Lubuklinggau lulus pada tahun 2012. Selanjutnya di tahun 2012 mengenyam pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Lubuklinggau lalu pindah pada tahun 2013 di SMA negeri 7 Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2015.

Syukur alhamdulillah kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2015 tercatat sebagai salah satu mahasiswa fakultas ushuluddin dan studi agama, jurusan pemikiran politik islam dan terselesaikan pada tahun 2019.

Bandar Lampung,
Yang Membuat

RISKA WAHYUNI

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt Tuhan yang maha esa atas berkat limpahannya serta rahmatnya dan karunia-nya, penyusunan skripsi dengan judul **“Peran Politik Perempuan dalam Pandangan Fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar (S1) Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan studi agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari pihak lain berupa bimbingan, petunjuk, saran, kritik, informasi, dan pengarahan oleh penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan berterima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, M.A selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. Effendi, M.Hum sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Tin Amalia Fitri. M. Si pembimbing II yang telah memberikan arahan, ilmu pengetahuannya, saran terhadap skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Bapak Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan studi Agama yang telah memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan studi Agama terkhususnya di jurusan pemikiran politik Islam.
6. Seluruh Staff kepegawaian dari tingkat dekanat sampai tingkat paling bawah fakultas ushuluddin dan studi Agama yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran skripsi ini.
7. Keluarga yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil.
8. Semua Pengurus Muhammadiyah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan data, informasi, bantuan, arahan, bimbingan, pengetahuan, pengalaman, saran, serta dukungan terhadap skripsi ini.
9. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan perpustakaan Daerah Lampung yang telah berkenankan penulis untuk meminjam literatur dalam penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Arif Saputra, seseorang yang sering mengajarku untuk menyikapi proses hidup dengan kesabaran yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dalam perjalanan pendidikanku, memberikan Semangat, selalu mendengar keluh kesahku dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Nasihat dan saran yang diberikan adalah hal yang menolong akan tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras lagi.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku tercinta Ani Wijayanti, Mutia Herlita Putri dan Aisya Amini Tanjung yang telah mendukung,

memberikan motivasi, dan menyemangati penulis memberikan energi positif untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada sahabat SMP ku hingga sekarang Novi Suryani, Mery Rulita, Susi Susilawati dan Ima Wulan Dari yang telah memberikan keceriaan, suasana yang berbeda, memotivasi, dan saling berbagi ilmu.

13. Teman seperjuangan sekaligus keluarga Pemikiran Politik Islam angkatan 2015 atas kebersamaannya dan kerja samanya.

14. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu demi terselesainya skripsi ini.

15. Teman-teman KKN 88 yang telah memberikan support dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT akan membalas kebaikan pihak-pihak tersebut atas segala bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta almamater tercinta. Akhir kata, penulis meminta maaf jika dalam penulisan dan penyusunan ada kesalahan kepada Allah SWT penulis mohon ampun.

Bandar Lampung,

Penulis

RISKA WAHYUNI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian	6
G. Signifikansi Penelitian	6
H. Metode Penelitian.....	6

BAB II PERAN POLITIK PEREMPUAN

A. Peran.....	15
1. Pengertian Peran.....	15
2. Unsur-unsur peran.....	16
3. Struktur Peran.....	17
4. Teori Peran.....	18
B. Politik dan perempuan.....	19
1. Pengertian Politik Gender	19
2. Posisi Perempuan dalam Undang-Undang.....	20
C. Tinjauan Pustaka	23

BAB III GAMBARAN UMUM MUHAMMADIYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	25
1. Sejarah Kota Bandar Lampung	25
2. Hari Jadi Kota Bandar Lampung.....	27
3. Letak Geografis Kota Bandar Lampung	28
4. Topografi.....	29

B. Gambaran Umum Muhammadiyah Kota Bandar Lampung	32
1. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.....	32
2. Sejarah Singkat Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.....	34
3. Visi dan Misi Muhammadiyah Kota Bandar Lampung	35
4. Ruang Lingkup Muhammadiyah Kota Bandar Lampung	35
5. Maksud dan Tujuan Serta Kedudukan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung	36
6. Anggaran Rumah Angga Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.....	37
7. Dasar Amal Usaha Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.....	38
8. Struktur Muhammadiyah Kota Bandar Lampung	39

BAB IV PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN FUNGSIONARIS MUHAMMADIYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Pandangan Fungsionaris Muhammadiyah Tentang Peran Politik Perempuan.....	40
B. Bentuk Partisipasi Politik Perempuan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.....	49

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Geografis Wilayah Kota Bandar Lampung.....	31
2. Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Bandar Lampung	32
3. Profil Muhammadiyah Kota Bandar Lampung	33
4. Struktur Muhammadiyah Kota Bandar Lampung	41



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Wawancara Dengan Bapak Ujang Suparman
Gambar 1.2 Wawancara Dengan Bapak Thabroni M. Zuhri
Gambar 1.3 Wawancara Dengan Bapak Ngatio Haryanto
Gambar 1.4 Lambang Muhammadiyah



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Konsultasi Bimbingan
2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
3. Pedoman Wawancara
4. Dokumentasi Pendukung
5. Kertas Keterangan Plagiarisem



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul pada skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang sangat penting, karena dapat memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Secara lengkap judul skripsi ini adalah : **“Peran Politik Perempuan Dalam Pandangan Fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung”**. Sebelum melanjutkan mengenai pembahasan-pembahasan terlebih dahulu akan dijelaskan arti atau definisi dari istilah-istilah terkandung didalamnya secara terperinci agar mudah dimengerti dan memahami maksud judul skripsi ini. Hal ini dengan maksud untuk lebih mudah memahami dan juga untuk mengarahkan pada maksud penelitian serta ulasan di inginkan penulis. Berikut adalah makna yang terdapat pada skripsi ini.

Peran politik perempuan adalah terlaksana atau tidaknya hak perempuan yang sedang dilibatkan dalam aktivitas atau partisipasi perempuan yang ada di lembaga parlemen maupun partai politik.¹

Fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung adalah anggota yang memiliki jabatan dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini Muhammadiyah kota Bandar Lampung memiliki jaringan kelembagaan Muhammadiyah yang terdiri dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), Pimpinan

¹Gurniwan K. Pasya, *Peranan Wanita Dalam Kepemimpinan dan Politik*, (Jurnal Wanita), h. 11.

Daerah Muhammadiyah (PDM), Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM).²

Berdasarkan pengertian di atas peneliti memasukan bahwa judul **“Peran Politik Perempuan Dalam Pandangan Fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung”** adalah tentang bagaimana pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung terhadap partisipasi perempuan yang ada di lembaga parlemen maupun partai politik.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan peneliti memilih sebuah judul skripsi peran politik perempuan dalam pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian tentunya memiliki berbagai alasan yang sangat memotivasi terhadap penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Muhammadiyah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu organisasi yang tidak melarang warganya untuk masuk ke ranah dunia politik termasuk kaum perempuan.
2. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan program studi yang ditempuh oleh peneliti adalah Pemikiran Politik Islam dengan menerapkan ilmu yang sudah di pelajari oleh penulis.
3. Kota Bandar Lampung merupakan objek yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal penulis sehingga mudah untuk di jangkau dan data yang diperlukan cukup tersedia dengan baik berupa teori (buku-buku) serta data

²Agus Miswanto, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*, (Magelang: P3SI UMM, 2012), h. 89.

lapangan yang terkait dengan penelitian ini sesuai dengan keilmuan penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Peranan politik perempuan sangat diperlukan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Kaum perempuan perlu hadir dan diberikan ruang maupun peluang untuk berkiprah di dalamnya dan telah ditetapkan bahwa dalam menduduki kursi parlemen atau partai politik perempuan diberikan hak sebesar 30%.

Hal ini tercantum pada pasal 65 Ayat 1 yang berbunyi : *“Setiap partai politik beserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”*.³ Dengan diberikannya ruang dan peluang tersebut maka diharapkan kaum perempuan yang berhasil duduk di parlemen dapat membuat dan menjunjung hak-hak perempuan yang selama ini kurang diperhatikan serta menyangkut pembahasan program dan produk hukum yang menyangkut hak dan kepentingan perempuan.

Pembahasan program dan produk hukum tersebut adalah hasil pemikiran dari kaum perempuan itu sendiri. Namun pada kenyataannya yang selama ini masih terjadi adalah perempuan diberi kesempatan masuk ke ranah politik hanya untuk memenuhi kuota perempuan saja. Tetapi setelah terlibat di dalamnya kaum perempuan tidak diberi ruang dan peluang untuk terlibat dalam rancangan

³Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 42.

program yang akan di gulirkan. Perempuan-perempuan yang masuk ke dunia politik belum menguasai dunianya bahkan ada yang tidak kenal sama sekali dengan politik sebenarnya. Hal ini harus menjadi perhatian bagi perempuan-perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik, agar mampu menjadi perempuan yang tangguh dan siap bersaing dengan kaum laki-laki.

Muhammadiyah Kota Bandar Lampung merupakan suatu organisasi dakwah yang tidak melarang pengurus maupun kadernya untuk terjun ke dunia politik asalkan tetap harus membawa nilai-nilai yang berpihak pada rakyat baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan maupun kesehatan, akan tetapi pada kenyataannya saat ini terdapat pengurus Muhammadiyah maupun masyarakat Muhammadiyah masuk ke dalam dunia politik.

Organisasi Muhammadiyah ini kurang adanya komitmen untuk mendukung orang Muhammadiyah khususnya yang maju untuk mengikuti proses demokrasi bahkan apabila ada pengurus Muhammadiyah yang maju mencalonkan diri untuk duduk dikursi parlemen maupun duduk di partai politik harus meninggalkan jabatan yang ia duduki di organisasi Muhammadiyah serta belum adanya seruan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh Muhammadiyah dalam mendukung sepenuhnya terhadap pengurus, kader maupun masyarakat Muhammadiyah yang ingin terjun ke dunia parlemen maupun partai politik.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis sangat tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul peran politik perempuan dalam pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung guna mengetahui bagaimana pandangan fungsionaris Muhammadiyah tentang peran politik perempuan dan bagaimana

bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Fokus dalam penelitian ini yaitu peran politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Adapun sub fokus pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Pandangan Fungsionaris Muhammadiyah
2. Bentuk partisipasi politik perempuan

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mencoba meneliti lebih dalam mengenai peran politik perempuan dalam pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang peran politik perempuan?
2. Bagaimana bentuk partisipasi politik perempuan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Adapun beberapa tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang peran politik perempuan.
2. Bentuk partisipasi politik perempuan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Pada penelitian skripsi ini di harapkan dapat memiliki berbagai manfaat untuk penulis dan pembaca, mencakup dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi Pemikiran Politik Islam dan dapat memberikan keilmuan terkait dalam bidang partisipasi politik perempuan, serta dapat dijadikan sebagai contoh jika ingin dilakukan penelitian kembali.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menambah sumber wawasan dan sebagai kajian pada bidang politik mengenai politik perempuan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini adalah sebuah bentuk ilmiah yang memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu.⁴ Menurut pendapat

⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV alfabeta, 2012), h. 34.

Mardais, bahwa metode penelitian ini diterjemahkan sebagai bentuk untuk dapat melakukan suatu tekis yang melibatkan pendapat secara bersama agar dapat tercapai suatu tujuan tertentu, sedangkan pada penelitian sendiri adalah suatu upaya pada bidang ilmu pengetahuan yang berguna untuk mendapatkan beberapa fakta dalam mewujudkan kebenaran secara berurutan.⁵

Metode penelitian yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tata cara dalam suatu penelitian sehingga berfungsi untuk mendapatkan banyak informasi berupa data yang akurat, supaya tercapainya ilmu pengetahuan yang tepat dan benar, sehingga diharapkan pada metode ini agar dapat mengantarkan penelitian untuk memperoleh data yang valid.

Dalam Sebuah metode seseorang diharapkan dapat mampu menganalisis dan menemukan suatu masalah tertentu. Dikarenakan metode ini dapat dijadikan sebagai bahan panduan terkait bagaimana cara seseorang dapat memahami, mempelajari, dan menganalisa sesuatu yang sedang di hadapi. Maka penelitian yang telah di laksanakan agar memperoleh data-data yang teruji sesuai kebenarannya sehingga dapat mengungkapkan kebenaran secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat-sifat populasi dan pada objek tertentu. Pendapat Bogdan dan Taylor, mendefinisikan pendekatan

⁵Mardis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004). Cet Ke 7, h. 24.

kualitatif sebagai susunan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis baik secara lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati.⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan (Field Resech), pada penelitian lapangan ini merupakan sebuah penelitian langsung terjun kelapangan yang biasa dilakukan pada kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini di lakukan di Kota Bandar Lampung.⁷

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang di peroleh, sedangkan sumber data dalam penelitian skripsi ini di bagi menjadi dua bagian yang bersumber dari:

a. Data Primer

Menurut pendapat Fathoni, bahwa data primer yaitu sebuah data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber pertama.⁸

Yang menjadikan sumber data primer dalam penelitian skripsi ini ialah sebuah informasi yang didapatkan langsung dari tempat penelitian yang di teliti dilakukan dengan cara wawancara secara langsung secara lisan kepada Bapak Ujang Suparman selaku ketua

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2014), h. 4.

⁷Kalean, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58.

⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38.

Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, Bapak Ngatio Haryanto dan Bapak Mukadi Ida Setiawan selaku wakil ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, Bapak Thabroni M. Zuhri selaku sekretaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, dan Bapak Gafri Gewang selaku bendahara Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Berdasarkan pendapat Fathoni, data sekunder yaitu suatu data yang telah tersusun kedalam sebuah bentuk dokumen, seperti demografi suatu daerah dan sebagainya.⁹ Data sekunder didapatkan melalui pengambilan data dari buku, internet, jurnal, maupun informasi lain terkait dengan objek penelitian.

4. Partisipan dan Tempat Penelitian

a. Partisipan

Partisipan yaitu seorang yang ikut serta pada penelitian skripsi ini. Partisipan terkait pada informan (actor yang akan di interview). Populasi merupakan wilayah general terdiri dari sebuah objek dan subjek yang memiliki ukuran kualitas atau karakteristik tertentu yang telah di tetapkan seorang peneliti untuk di pelajari dan diambil kesimpulannya. Totalitas dari banyak objek yang mempunyai sebuah karakteristik sesuai pada penelitian yang diteliti.¹⁰

Pada penelitian skripsi ini populasi dimaksud yaitu seluruh Fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

⁹ *Ibid.*,h. 40.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 90.

Sampel yaitu jumlah bagian dari karakteristik yang di miliki oleh populasi.¹¹ Dalam pengambilan sampling dengan menggunakan teknik *Purposive non random Sampling* adalah yang di lakukan dengan mengambil langsung pada subjek bukan di dasarkan pada starta, random atau daerah tetapi di dasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pada penelitian skripsi ini informannya yaitu fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung serta dalam penelitian peneliti mudah mendapatkan informasi dengan menggunakan teknik pengambilan informan menggunakan teknik *Purposive non random Sampling*. Informan yang berjumlah 5 anggota terdiri dari bapak Ujang Suparman ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, bapak Ngatio Haryanto dan bapak Mukadi Ida Setiawan wakil ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, bapak Thabroni M. Zuhri sekretaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung dan bapak Gafri Gewang bendahara Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

b. Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini bersumber dari peneliti dengan menggunakan metode lapangan yang didukung oleh data pustakaan atau jurnal adalah pengambilan data dan informasi yang meliputi berbagai

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 57.

macam materi yang didapatkan penulis di ruang perpustakaan serta data-data yang relevan sesuai dengan penelitian ini. Menurut Sugiono, metode pengumpulan data penelitian kualitatif yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi.¹² Penelitian ini menggunakan metode:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi dapat memiliki ciri khas yang sangat spesifik, dengan demikian observasi menjadi tidak terbatas pada orang namun pada objek yang lain. Observasi (pengamatan) pendapat Marshall didalam pengambilan kutipan Fenti Himawati yaitu *“through observation, the researcher about and the meaning attached to those behavior”*. Pada pemaparan dijelaskan bahwa melalui observasi, penelitian skripsi ini mendapatkan banyak data dengan cara mempelajari serta memahami tingkah laku secara langsung.¹³

Melalui teknik observasi pada penelitian ini penulis ikut turun langsung kelapangan agar dapat memperoleh sebuah data, baik data primer maupun data sekunder serta dapat dilihat secara jelas bagaimana reaksi dari narasumber tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap data-data yang berhubungan dengan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

¹²Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), h. 124.

¹³Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), h. 80.

b. Wawancara

Wawancara menurut pendapat Faisal merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa angket pertanyaan-pertanyaan yang akan di sampaikan secara lisan.¹⁴

Pada penelitian skripsi ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, maksudnya penginterview dengan cara kebebasan pada orang yang diinterview langsung untuk memberikan sebuah solusi atau jawaban yang sesuai dengan pendapatnya, pada metode interview ini dapat digunakan sebagai memperoleh data yang akan diteliti oleh penulis. Interview tersebut dijadikan sebagai bahan metode utama untuk menggali data dan informasi yang sesuai pada penelitian ini.

Wawancara (interview) penelitian ini diajukan kepada fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Metode ini di jadikan sebagai acuan dalam informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh sesuai tentang peran politik perempuan dalam pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

Teknik yang digunakan dalam wawancara tersebut memiliki kelebihan yaitu dapat membuat suasana menjadi tidak kaku, sehingga pada proses pengumpulan data tujuannya mudah dicapai. Dengan mempertahankan atau kebebasan unsur terpimpin wawancara dapat mendekatkan maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien yaitu

¹⁴Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 137.

seperti mewawancarai yang dilakukan pada penelitian ini dengan mengahapkan tercapai hasil yang tepat dan cermat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian data terkait dengan hal-hal atau variabel dalam bentuk berupa transkrip, catatan, buku, surat kabar, majalah, foto, internet, maupun jurnal.¹⁵ Terkait dengan dokumen yang telah diperoleh dari hasil penelitian supaya dapat dipastikan dan diperkuat dengan fakta tertentu seperti foto-foto pada saat mewawancarai fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung terkait dengan pandangan mereka terhadap peran politik perempuan.

6. Metode Analisis Data

Pendapat Moleong, bahwa metode analisis data yaitu suatu proses menggabungkan dan mengurutkan data kedalam bentuk kategori dan satuan uraian yang dapat dikelolah dan dapat ditemukan temanya serta dirumuskan hipotesis kerja yang di sarankan oleh data.¹⁶

Boghan dalam Sugiono mendefinisikan analisis data adalah suatu proses pencarian atau penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, catatan lapangan dan bahan lainnya, sehingga sangat mudah di pahami dan penemuannya bisa di informasikan kepada orang lain.¹⁷ Pada analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu

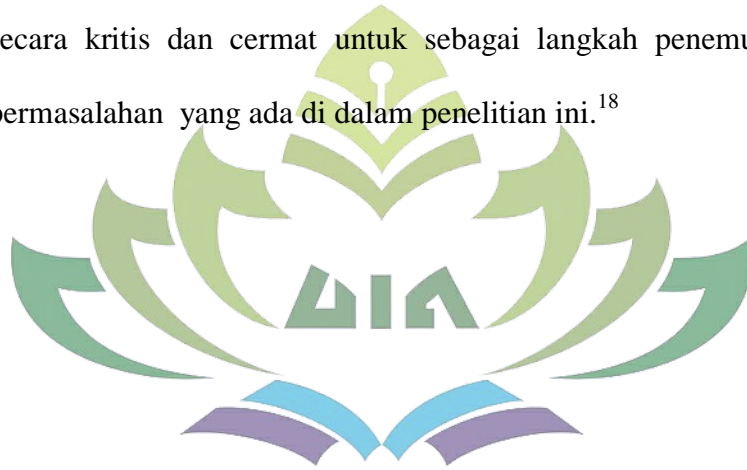
¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara, 2008), cet ke VII, h. 231.

¹⁶*Ibid.*, h. 280.

¹⁷*Ibid.*, h. 244.

deskriptif analisis kualitatif. Deskriptif yang dimaksud merupakan isi pemikiran yang berkaitan dengan sebuah judul karya ilmiah yang ingin dikaji yaitu peran politik perempuan dalam pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

Maksud dalam memahami jalan pemikiran serta makna yang terkandung pada konsep sebuah pemikiran serta pandangannya. Bentuk-bentuk pemikiran terhadap peran politik perempuan dalam pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung dapat di analisis baik secara kritis dan cermat untuk sebagai langkah penemuan dari pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.¹⁸



¹⁸*Ibid.*, h. 42.

BAB II PERAN POLITIK PEREMPUAN

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam kehidupan di masyarakat.¹⁹ Peran berkaitan erat dengan status sosial dan keduanya sulit dipisahkannya.²⁰

Sedangkan menurut Soejono Soekanto mendefinisikan peran adalah pola perilaku yang berhubungan dengan status. Soejono Soekanto menjabarkan bahwa peran yaitu aspek dinamis dari suatu kedudukan (status) yang di miliki oleh seseorang, apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang yang bersangkutan melaksanakan suatu peranan.²¹ Perbedaan antara kedudukan dengan peranan yaitu hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan, maka keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling ketergantungan satu sama lainnya dan sebaliknya.²²

Sedangkan menurut pendapat Abu Ahmadi mengartikan bahwa peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap bagaimana caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial.²³

¹⁹Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia, Kontemporer, edisi pertama*, (Jakarta: Moderen English Press, 1991), h. 1132.

²⁰Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 33.

²¹Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), edisi baru, h. 267.

²²Ralph Linton, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), h. 268.

²³Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), h. 106.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan peran merupakan perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh seseorang yang berhubungan dengan status sosial atau kedudukan yang dimiliki dengan harapan dapat memberikan pengaruh pada sekelompok orang maupun masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan politik perempuan dapat diartikan bahwa peran merupakan suatu peluang atau kesempatan perempuan untuk turut andil bagian dalam ranah publik untuk urusan-urusan kemasyarakatan.

2. Unsur-unsur Peran

Peran juga dikenali dari keterlibatan dalam keputusan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, dan penetapan tujuan.²⁴ Adapun Unsur-unsur peran sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dalam keputusan maksudnya adalah pemimpin yang sulit dalam membuat sebuah keputusan tanpa melibatkan bawahannya, maka keterlibatan ini dapat dikatakan formal seperti menggunakan kelompok dalam mengambil keputusan atau informal seperti permintaan akan gagasan-gagasan.
- b. Bentuk Kontribusi maksudnya adalah bawahan yang memberikan idenya, tenaganya, atau gagasannya untuk kemajuan kedepannya terhadap atasannya.

²⁴ Parwoto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 28.

- c. Organisasi kerja maksudnya yaitu terdiri dari beberapa orang yang dikatakan sebagai atasan sedangkan sekelompok orang dengan sebutan bawahan yang bekerja sama dalam menempatkan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan (berbagi peran).
- d. Penetapan tujuan maksudnya yaitu suatu rencana strategi yang telah ditetapkan antara atasan dan bawahan yang memiliki misi-misi sesuai dengan jangka waktu tertentu sehingga tercapainya sebuah tujuan tersebut.²⁵

3. Struktur Peran

Struktur peran ini di kelompokkan menjadi dua bagian, sebagai berikut:

a. Peran Formal

Suatu peran yang nampak jelas/terbuka, yaitu segala perilaku yang sifatnya homogen. Contoh: Dalam keluarga, suami/ayah dan Istri/Ibu memiliki peran sebagai provider, pengatur rumah tangga, merawat anak, serta lain-lain.

b. Peran Informal

Merupakan peran yang tertutup, suatu peran yang mempunyai sifat implisit serta tidak terlihatnya di permukaan. Tujuan dari peran ini yaitu untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga

²⁵ Soehandy Joesoef, *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Lahan Terkendali di Kawasan Pinggiran Kota "Studi kasus: Desa Ciboga, Kab Tangerang"*, (Jabar: Tesis, 1997).

4. Teori Peran

Teori peran yaitu teori yang merupakan perbandingan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain psikologi teori peran ini juga berawal dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut peran diambil dari dunia teater yang menyatakan bahwa seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam keadaan posisi sebagai tokoh yang diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.²⁶

Teori peran menurut Robert Linton sebagai antropolog, menurutnya teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi seorang aktor harus bermain sesuai apa yang telah ditetapkan oleh budaya. Sesuai dalam teori ini bahwa harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Dalam buku, mengutip Biddle dan Thomas, Sarlito membagi dalam teori peran menjadi empat golongan yaitu istilah yang menyangkut sebagai berikut:²⁸

- a. Orang yang mengambil bagian di dalam interaksi tersebut.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang dalam perilaku tersebut.
- d. Kaitannya antara orang dengan perilaku tersebut.

²⁶*Ibid.*, h. 19.

²⁷Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989), h. 105.

²⁸Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 215.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang pasti mempunyai peran, baik dalam keluarga, masyarakat, organisasi maupun institusi. Baik secara interaksi, tingkah laku dan lainnya. Maka dari itu peran-peran telah ditentukan oleh norma-norma masyarakat. Maksudnya, seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan dan status.

B. Politik Perempuan

1. Pengertian Politik Gender

Politik menurut Miriam Budiardjo menyatakan bahwa politik adalah “Berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang didalamnya terdapat proses menentukan dan melakukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut”.²⁹ Sedangkan pendapat Inu Kencana Syafiiie mengartikan bahwa dasarnya politik memiliki ruang lingkup negara, karena pada teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat.³⁰ Secara lebih luas politik adalah sebagai ilmu dan seni tentang pemerintahan yang didalamnya terdapat aspek kekuasaan, institusi-institusi kekuasaan, atau perlawanan-perlawanan.

Gender didefinisikan oleh Lesswell dalam buku karangan Remiswal adalah pengetahuan dan kesadaran, baik secara sadar atau tidak sadar bahwa seseorang masuk kedalam golongan jenis kelamin.³¹ Sedangkan pendapat Siti

²⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 29.

³⁰Inu Kencana Syafiiie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. Ke-2, h. 9.

³¹Remiswal, *Menggugat Partisipasi Gender di Lingkungan Komunikasi Lokal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet. ke-1, h. 12.

Musdah Mulia mendefinisikan gendera dalam peran sosial yang dijalankan oleh masyarakat. Peran ini berkaitan dengan tugas, hak, kewajiban, fungsi dan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan.³² Dapat disimpulkan pengertian gender adalah perbedaan gender dengan jenis kelamin, gender membahas peran dan kedudukan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki sesuai dengan kemampuan dan pandangan masyarakat, sedangkan jenis kelamin membahas perbedaan biologis yang terdapat pada laki-laki dan perempuan, atau kodrat yang diberikan oleh tuhan atau dirubah.

Politik Gender pendapat Mansour Fakih merupakan pemberdayaan perempuan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Hak-hak politik meliputi keberadaan politik secara luas baik dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat, penetapan kebijakan oleh negara, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan.³³

2. Posisi Perempuan dalam Undang-Undang

Menurut Annisa Fitri Dwi Mardiah dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peraturan yang menyertakan keterwakilan perempuan terdapat pada Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu untuk menjadi anggota dewan atau parlemen. Pasal-pasal tersebut sebagai berikut:³⁴

³²Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), Cet. Ke-1, h. 25.

³³*Ibid.*, h. 258.

³⁴Annisa Fitri Dwi Mardiah, "Peranan Wanita Dalam Politik Menurut Undang-undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, 2013).

1. Pasal 8 (1), partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: (d) menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
2. Pasal 15, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) berbunyi: (d) Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 55, daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 menurut paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.
4. Pasal 56 (2), didalam daftar bakal calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
5. Pasal 58 (1), KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. (2) KPU Propinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan

verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.

6. Pasal 59 (3), dalam hal daftar calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik.
7. Pasal 65 (1), setiap partai politik beserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Dari menjelaskan pasal-pasal di atas sudah terlihat bahwa keterwakilan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik terutama untuk menduduki jabatan sebagai anggota parlemen sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan melalui partai politik.

Aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Adapun hal yang menarik dari partai politik yang dipaksa untuk beradaptasi dengan kuota 30% perempuan, muncul beberapa tanggapan, reaksi maupun respon dari partai-partai politik terhadap kinerja KPU. Kuota 30% merupakan cara untuk menguji seberapa besarnya partisipasi perempuan dalam politik dan sekaligus menguji komitmen partai politik terhadap perempuan. Sistem ini diharapkan menjadi gerbang awal bagi keterwakilan perempuan, Meskipun respon dari partai politik berbeda.

C. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis terkait dengan referensi mengenai politik perempuan dalam pandangan fungsionaris muhammadiyah dan menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Politik perempuan perspektif Muhammadiyah”** ditulis oleh Martoyo mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk perbedaan dalam skripsi ini mengenai pemberdayaan politik perempuan di peruntukan mengubah arah dan sifat dari kekuatan-kekuatan sistematis terhadap perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya dan penelitian nya pada tahun 2008 sedangkan penulis membahas mengenai peran politik perempuan di lihat dari sudut pandang para fungsionaris muhammadiyah di Kota Bandar Lampung dan penelitiannya pada tahun 2019.³⁵
2. Penelitian dengan judul **“Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif”**. Ditulis oleh Nuni Silvana mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto pada tahun 2013. Dalam skripsi ini membahas mengenai

³⁵Martoyo, “Pemberdayaan Politik Perempuan Perspektif Muhammadiyah”. (Skripsi sarjana Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

partisipasi politik perempuan yang di beri kuota 30% baik dalam kepengurusan partai politik maupun mencalon legislatif.³⁶

3. Penelitian dengan judul **“Politik Perempuan di Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)”**.

Ditulis oleh Sri Sumarni Sjahril mahasiswi Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016, Dalam skripsi ini membahas mengenai berawal dari jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum. Menggambarkan perempuan nasdem Kota Makassar yang memiliki peran sangat penting di masyarakat dalam hal memberikan pendidikan politik terhadap anak muda Makassar.³⁷

Pada Skripsi yang penulis susun tentunya akan berbeda dengan tinjauan pustaka diatas yang telah membahas pemberdayaan politik perempuan, keterwakilan perempuan dan peran politik perempuan nasdem Kota Makassar. Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih melihat pada peran politik perempuan dilihat dari sudut pandang Muhammadiyah Kota Bandar Lampung dan bagaimana bentuk partisipasi yang di lakukan perempuan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung untuk secara aktif dalam berpolitikan sehingga penelitian ini terhindar dari sifat plagiat.

³⁶Nuni Silviana, “Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif”. (Skripsi Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2003).

³⁷Sri Sumarni Sjahril, “Politik Perempuan di Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)”. (Skripsi Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016).

BAB III

GAMBARAN UMUM MUHAMMADIYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota yang berada di Indonesia sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga termasuk kota terbesar dan terpadat dari urutan ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang jika dilihat dari jumlah penduduknya, serta termasuk salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terpadat di luar Pulau Jawa.

Kota Bandar Lampung terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera yang memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat dari Jakarta, memiliki peran penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 Km² yang terbagi kedalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan jumlah populasi 1.251.542 jiwa, daerah-daerah sekitarnya sebelum tahun 1912, Ibukota Telok Betong termasuk ke wilayah Tanjung Karang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara Kota Telok Betong, Ibukota *Onder Afdeling* Telok Betong adalah Tanjung Karang, sementara Kota Telok Betong sendiri

mempunyai kedudukan sebagai Ibu Kota Keresidenan Lampung. Kedua Kota tersebut tidak termasuk ke dalam Marga Verband, melainkan berdiri dengan sendiri dan di kepalai oleh seorang Asisten Demang yang tunduk kepada *Hoof Van Plaatsleyk Bestuur* selaku Kepala *Onder Afdeling* Telok Betong.

Pada zaman pendudukan Jepang, kota Tanjung Karang-Telok Betong dijadikan *shi* (Kota) di bawah pimpinan seorang shicho (Bangsa Jepang) dan di bantu oleh seorang mulai diperkenalkan dengan istilah Kota Tanjung Karang-Telok Betong.

Secara Geografis, Telok Betong berada di selatan Tanjung Karang, karena berada di marka jalan, Telok Betong yang dijadikan patokan batas jarak Ibukota Provinsi, Telok Betong, Tanjung Karang dan Panjang (serta Kedaton) merupakan wilayah tahun 1984 digabung dalam satu kesatuan Kota Bandar Lampung, mengingat ketiganya sudah tidak ada batas pemisahan yang jelas.

Pada perkembangannya selanjutnya, status Kota Tanjung Karang dan Telok Betong terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada Tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung (Berdasarkan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1965), Kota Tanjung Karang-Telok Betong berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Telok Betong dan Sekaligus menjadi Ibukota Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Telok Betong berubah

menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30), tambahan Lembaran Negara Nomor 3254), kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian di tindak lanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini.³⁸

2. Hari Jadi Kota Bandar Lampung

Hari jadi kota Bandar Lampung berdasarkan catatan laporan dari Residen Banten *William Craft Is* pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) yang di sampaikan pada tanggal 17 Juni 1682 berisikan: “Lamong Telok Betong di tepi laut merupakan tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang” (*Deghregistor* di buat dan di pelihara oleh pimpinan VOC), berdasarkan Staabat Nomor: 1011873 (*Beslit Gouvenur General*) pada tanggal 8 April 1873 nomor 15 tentang Pembagian Keresidenan Lampung menjadi 6 Afdiling Telok Betong dengan Ibukota Telok Setong dan hasil simposium Hari Jadi Kota Tanjung Karang- Telok Betong pada tanggal 18 November 1982, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah pada tanggal 17 Juni 1682.

³⁸ Documen Profil Kota Bandar Lampung

3. Letak Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah daratan seluas 169,21 Km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan Populasi penduduk 1.251.642 jiwa (berdasarkan data Tahun 2014), kepadatan penduduk sekitar 8,316 jiwa/km² dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada Tahun 2030. Secara astronomis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai 5°30' Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' Bujur Timur. Saat ini Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian.

Untuk Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan beberapa wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar - Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) dan Katibung (Kabupaten Lampung Selatan) serta Teluk Lampung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran).
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang (Kabupaten Lampung Selatan).

4. Topografi

Topografi Kota Bandar Lampung beragam macam mulai dari dataran, pantai, sampai kawasan perbukitan hingga bergunung dengan memiliki ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 M daerah dengan topografi perbukitan hingga gunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung di Balau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

- a. Wilayah pantai terdapat disekitar Telok Betong dan Panjang serta pulau di bagian Selatan.
- b. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara.
- c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telok Betong bagian Utara.
- d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadana Ham dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur.
- e. Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan-kecamatan lainnya yang berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Telok Betong Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing.

Tabel 1
Luas Geografis Wilayah Kota Bandar Lampung

NO	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Kedaton	457
2	Sukarame	1.475
3	Tanjung Karang Barat	1.064
4	Panjang	1.415
5	Tanjung Karang Timur	269
6	Tanjung Karang Pusat	405
7	Teluk Betung Selatan	402
8	Teluk Betung Barat	1.102
9	Teluk Betung Utara	425
10	Rajabasa	636
11	Tanjung Senang	1.780
12	Sukabumi	2.821
13	Kemiling	2.505
14	Labuhan Ratu	864
15	Way Halim	535
16	Langkapura	736
17	Enggal	349
18	Kedamaian	875
19	Teluk Betung Timur	1.142
20	Bumi Waras	465
Jumlah		19.722

Sumber: Dokumen Profil Kota Bandar Lampung, Dicatat pada tahun 2016-Sekarang

Berdasarkan Sensus BPS, pada tahun 2017 Kota Bandar Lampung memiliki populasi penduduk sebanyak 1.015.910 jiwa, meningkat dari tahun 2016 sebanyak 997.728 jiwa dengan luas wilayah sekitar 197,22 km²,

sedangkan Kota Bandar Lampung memiliki kepadatan penduduk 5.151 jiwa/km².

Tabel 2
Jumlah penduduk Kecamatan Kota Bandar Lampung

NO	Kecamatan	Jumlahh Penduduk (Jiwa)
1	Kedaton	58.875
2	Sukarame	56.768
3	Tanjung Karang Barat	35.218
4	Tanjung Karang Pusat	50.901
5	Tanjung Karang Timur	49.835
6	Teluk Betung Utara	59.496
7	Teluk Betung Barat	47.496
8	Teluk Betung Selatan	46.528
9	Teluk Betung Timur	59.061
10	Bumi Waras	30.917
11	Kedamaian	40.836
12	Enggal	43.212
13	Langkapura	54.571
14	Pajang	52.497
15	Kemiling	77.098
16	Raja basa	53.046
17	Labuhan Ratu	38.505
18	Sukabumi	29.140
19	Tanjung Senang	68.105
20	Way Halim	63805
Jumlah		1.015.910

Sumber: Dokumen Profil Kota Bandar Lampung, Dicatat pada tahun 2017-Sekarang

B. Gambaran Umum Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

1. Profil Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

Tabel 3

Profil Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

Nama Organisasi	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung
Ketua Priode (2015-2020)	Drs. H. M. Ujang Suparman, MA., Ph. D
Alamat Kantor	Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132
Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Pusat 2. Pimpinan Wilayah 3. Pimpinan Daerah 4. Pimpinan Cabang 5. Pimpinan Ranting
Majelis-majelis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Tarjih dan Tadjud 2. Majelis Tabligh 3. Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) 4. Majelis Pendidikan Kader (MPK) 5. Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) 6. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) 7. Majelis Lingkungan Hidup (MLH) 8. Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) 9. Majelis Pelayanan Sosial (MPS) 10. Majelis Hukum dan Hak Asasi

	<p>Manusia (MH-HAM)</p> <p>11. Majelis Pendidikan Tinggi (MPT)</p> <p>12. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)</p> <p>13. Majelis Wakaf dan Keharta bendaan (MWK)</p>
Lembaga-lembaga	<p>1. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqqah (LAZIS)</p> <p>2. Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan</p> <p>3. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting</p> <p>4. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik</p> <p>5. Lembaga Penanganan Bencana</p> <p>6. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga</p> <p>7. Lembaga Penelitian dan Pengembangan</p> <p>8. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional</p>
Organisasi Otonom	<p>1. Aisyiyah</p> <p>2. Pemuda Muhammadiyah</p> <p>3. Nasyiyatul Aisyiyah</p> <p>4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah</p> <p>5. Ikatan Pelajar Muhammadiyah</p> <p>6. Hizbul Wathan</p> <p>7. Tapak Suci</p>

Sumber : Dokumentasi Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, Dicatat tahun 2015-sekarang

2. Sejarah Singkat Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

Muhammadiyah di dirikan pada tanggal 18 November 1912 tepatnya di kampung Kauman Yogyakarta terbentuknya suatu Organisasi Islam terinsipasi oleh seorang tokoh yang bernama Muhammad Darwis atau di kenal dengan K.H. Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai Khatib dan sebagai pedagang. Organisasi tersebut di namakan organisasi Muhammadiyah. Pada perkembangannya organisasi Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Lampung. Muhammadiyah Kota Bandar Lampung memiliki visi dan misi menegakan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Muhammadiyah Kota Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1970 saat ini telah mempunyai kepengurusan tingkat cabang (Kecamatan) hingga tingkat Ranting (Kelurahan) di seluruh kelurahan Kota Bandar Lampung. Organisasi Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang berasaskan Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunah. Muhammadiyah Kota Bandar Lampung sebagai sebuah organisasi yang berada di naungan Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tentunya tujuan serta asas organisasinya mengacu kepada organisasi induknya yaitu Muhammadiyah Pusat. Namun, dalam pelaksanaan mekanismenya organisasi Muhammadiyah Kota Bandar Lampung mempunyai otoritas tersendiri sebagai sebuah organisasi yang berada di daerah.

3. Visi dan Misi Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

- a. Visi Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- b. Misi Muhammadiyah terdiri dari :
 1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT, yang dibawa para rasul Allah, yang di syari'atkan sejak Nabi Nuh A.S hingga Nabi Muhammad SAW.
 2. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan ajaran agama Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi.
 3. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-qur'an sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia dan sunah Rasul.
 4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.³⁹

4. Ruang Lingkup Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

Ruang lingkup gerakan Muhammadiyah mengembangkan kegiatan melalui usaha bidang, usaha bidang tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Gerakan Dakwah Sosial-Kemasyarakatan

Gerakan ini menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan yang berupa peningkatan kualitas sumber daya insani penegakan supremasi

³⁹Documen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

hukum dan Hak Asasi Manusia, seni dan budaya, melakukan pelatihan, dialog, penyikapi terhadap persoalan-persoalan aktual bangsa, seminar *workshop*, dan lokakarya mengenai permasalahan publik, serta kegiatan sosial lainnya.

2. Gerakan Keilmuan

Gerakan ini memfokuskan diri pada pengkajian masalah-masalah keilmuan, khususnya tentang ilmu Islam.

3. Gerakan Kewirausahaan

Gerakan ini sesuai dengan namanya berkonsentrasi pada masalah kewirausahaan, khususnya dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat,

5. Maksud dan Tujuan serta Kedudukan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

Muhammadiyah Kota Bandar Lampung ini memiliki maksud dan tujuan yaitu menghimpun, membina dan menggerakkan potensi masyarakat Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa organisasi Muhammadiyah ini berasaskan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As Sunah.

Muhammadiyah juga di tuntut perannya untuk mencapai tujuan yakni terciptanya masyarakat yang utama yang diridha oleh Allah SWT. Artinya dalam setiap aktifitas gerakan Muhammadiyah tidak bisa terlepas dari kondisi

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan agenda yang paling utama.

6. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Meningkatkan semangat ibadah, zakat, jihad, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih.
4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia.
5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.
6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.

9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.
13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.

7. Dasar Amal Usaha Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

Dalam perjuangan menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah mendasarkan segala suatu gerak dan amal usahanya atas dari prinsip-prinsip Anggaran Dasar Muhammadiyah, sebagai berikut:

1. Hidup pada manusia harus berdasarkan pada tauhid, ibadah dan taat kepada Allah.
2. Hidup manusia harus bermasyarakat.
3. Dalam mematuhi ajaran agama Islam harus dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

4. Menegakkan serta menjunjung tinggi agama Islam didalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan insan kepada kemanusiaan.
5. Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW.
6. Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan keterlibatan organisasi.

8. Struktur Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

Tabel 4
Struktur Muhammadiyah Kota Bandar Lampung
Periode 2015-2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. M. Ujang Suparman, MA.,Ph.D	Ketua
2	Drs. H. Ngatio Haryanto	Wakil Ketua
3	Ir. H. Bambang Insaf Sentosa	Wakil Ketua
4	Drs. Hermansyah, MM	Wakil Ketua
5	Drs. Mukadi Ida Setiawan	Wakil Ketua
6	Drs. Suwita, AS	Wakil Ketua
7	Thabroni M. Zuhri, S.Ag	Sekretaris
8	H. Imam Asrofi AC, S.Ag, M.Pd.I	Wakil Sekretaris
9	Ir. H. Gafri Gwang, MM	Bendahara
10	Drs. H. M. Baijuri Rasyid, M.Ag	Penasihat
11	H. A. Rahmatan	Penasihat
12	Drs. H. Irwan Amrullah, MM	Penasihat

Sumber : Dokumentasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, Dicatat tahun 2015-Sekarang

BAB IV

HASIL PENELITIAN PERAN POLITIK PEREMPUAN MUHAMMADIYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Pandangan Fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung Tentang Peran Politik Perempuan

Penelitian dalam skripsi ini mencoba untuk menganalisa pandangan Fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung terkait dengan peran politik. Dalam hal ini untuk mengetahui hasil penelitian maka peneliti melakukan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung dengan melakukan wawancara secara langsung, tanpa merubahi hasil yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber yang telah penulis wawancarai.

Membahas soal tentang peran menurut Soejono Soekanto menjabarkan bahwa peran adalah kedudukan atau status yang dimiliki dari seseorang, apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melakukan suatu peran.⁴⁰

Sedangkan menurut Abu Ahmadi menjelaskan peran sebagai seperangkat harapan-harapan seseorang yang menempati kedudukan berdasarkan status dan fungsi sosial tertentu.⁴¹

Dengan uraian pengertian diatas yang di maksud peran yaitu suatu perilaku atau tindakan yang dimiliki oleh seseorang yang berhubungan dengan status sosial atau kedudukan dengan harapan dapat memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau masyarakat. Sedangkan politik

⁴⁰Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), edisi baru, h. 267.

⁴¹Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), h. 48.

perempuan adalah suatu cara atau usaha yang ditempuh oleh perempuan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Politik juga berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, distribusi/ pembagian dan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat.

Membahas tentang pandangan menurut Slameto menyatakan bahwa pandangan adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia melalui persepsi manusia secara terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya meliputi indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.⁴² Sedangkan menurut Robbins mendeskripsikan bahwa pandangan merupakan kesan yang diperoleh oleh setiap individu melalui panca indera kemudian di analisa, diinterpretasi dan kemudian di evaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.

Dengan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan merupakan proses perlakuan individu yang menganalisa dan mengintepretasikan terhadap apa yang dilihat, didengar atau dirasakan melalui panca indera dalam bentuk sikap, pendapat dan tingkah laku yang disebut sebagai perilaku individu.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Thabroni M. Zuhri selaku sekretaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

“Saya melihat keputusan perempuan yang berpolitik ini memang sangat dibutuhkan dan memang seharusnya perempuan di ikut sertakan dalam suatu parlemen maupun partai politik agar anggota perempuan yang ikut serta dalam lembaga parlemen maupun partai

⁴²*Ibid.*, h. 101.

politik dapat mewakili kaum perempuan supaya aspirasi-aspirasi perempuan dapat di dengar dan hak-hak yang belum terwujud dapat terlaksanakan”⁴³

Hal ini mengenai apa yang dilihat dan didengar terhadap keputusan yang diambil oleh perempuan yang terjun ke dunia politik, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mukadi Ida Setiawan selaku wakil ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

“Keputusan kaum perempuan yang terjun ke dunia perpolitikan tidak ada masalah dan biasa saja. Sepanjang kaum perempuan itu mempunyai bakat dan minat serta kemampuan yang memadai. Tentu sebagaimana yang lain, bahwa perempuan berpolitik harus menjaga etika dan rambu-rambu ajaran agama”⁴⁴

Beliau beranggapan bahwa perempuan yang terjun ke dunia politik tidak ada permasalahan, selama perempuan tersebut dianggap mampu dan berbakat dalam berpolitik dan harus menjaga etika dan rambu-rambu ajaran agama. Politik sendiri merupakan pengaturan strategi demi untuk mensejahterakan masyarakat melalui anggota legislatif yang amanah. Justru ketika perempuan yang terjun ke dunia politik terutama hadir dalam kursi-kursi parlemen sangat dibutuhkan untuk mampu mewakili kaum perempuan agar aspirasi-aspirasi perempuan dapat didengar dan hak-hak yang belum terwujud dapat terlaksanaan.

Bisa kita lihat secara jelas antara pengertian peran dan pengertian politik perempuan berkaitan, karena .dalam penelitian ini menyatakan bahwa setiap orang pasti memiliki peran, baik dalam masyarakat, keluarga,

⁴³Thabrani M. Zuhri, wawancara dengan penulis, Rumah kediaman bapak Thabrani, Sukarame Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

⁴⁴Mukadi Ida Setiawan, wawancara dengan penulis, via whatsapp, Kota Bandar Lampung, 15 Oktober 2019.

maupun organisasi, maksudnya suatu peran dan politik muncul pada setiap individu yang berhubungan dengan status sosial atau kedudukan dengan mewujudkan tujuan tertentu. Berikut ini adalah wawancara penulis dengan Bapak Ujang Suparman selaku ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

“Oh di Muhammadiyah itu sendiri sejak awal berdirinya pada tanggal 18 November 1912 yang paling tua, Muhammadiyah menjunjung tinggi harkat martabat perempuan, makanya sejak berdirinya jauh sebelumnya indonesia merdeka kita Muhammadiyah sudah punya Aisyiyah (Ibu-Ibunya Muhammadiyah) sampai sudah tingkat nasional. Struktur nya sangat luar biasa itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi dan pendukung peran politik perempuan dalam politik dan sejak dulu sampai sekarang banyak Ibu-ibu Muhammadiyah (Aisyiyah) termasuk gadis-gadisnya Muhammadiyah (Nasyiatul Aisyiyah) berperan aktif dalam Parpol misalnya, dalam kepemimpinan sudah banyak sekali. Contoh untuk di rektor ada, dari pimpinan pusat dan di dalam pendidikan juga Muhammadiyah juga ada Universitas Aisyiyah, di Bandar Lampung juga ada gedung dakwah Aisyiyah itu menunjukkan bahwa perempuan setara kalo orang lain berbicara tentang masalah gender. Muhammadiyah sudah dahulu membahas tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Muhammadiyah juga mengajak para anggota dan para kader-kader termasuk perempuan untuk dituntut melakukan kegiatan amal usaha lainnya yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah”⁴⁵

Muhammadiyah awal berdiri sejak 18 November 1912 menjunjung tinggi harkat, martabat perempuan dari sejak berdirinya jauh sebelum Indonesia sudah Merdeka, Muhammadiyah sudah memiliki Aisyiyah yaitu Ibu-ibunya Muhammadiyah sampai ketinggian Nasional. Beliau memaparkan bahwa Aisyiyah memiliki struktur yang sangat luar biasa ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi dan mendukung sepenuhnya terhadap peran politik perempuan dilihat dari Ibu-ibu

⁴⁵Ujang Suparman, wawancara dengan penulis, Gedung FKIP Universitas Lampung, Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

muhammadiyah (Aisyiyah) termasuk gadis-gadisnya Muhammadiyah (Nasyiyatul Aisyiyah) yang berperan aktif dalam partai politik.

Seperti yang diungkapkan oleh Menurut bapak Ujang Suparman selaku ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung sebagai berikut

“Keputusan perempuan yang ikut serta dalam lembaga legislatif boleh boleh saja, karena dari Muhammadiyah sendiri mendukung sepenuhnya terhadap perempuan yang berpolitik. Asal tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan bertugas utama yaitu membesarkan anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya dan melayani suami.”⁴⁶

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa peran politik perempuan dalam pandangan fungsionaris Muhammadiyah beranggapan bahwa Muhammadiyah sudah sejak lama menjunjung tinggi kesetaraan gender, serta sangat mendukung dan menjunjung tinggi perempuan yang berkarir di dunia politik, hal ini terlihat dari bentuk pelaksanaan dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, terlihat jelas bahwa dalam menjalankan suatu kegiatan telah mengedepankan kesetaraan gender bisa dilihat dari peran politik perempuan yaitu dengan kegiatan amal usaha dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya menjadi salah satu ukuran dari keberhasilan tersebut.

Hal lain juga diungkapkan oleh wakil ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung mengenai peranan politik perempuan, oleh Bapak Mukadi Ida Setiawan mengenai peran politik perempuan sebagai berikut

“Menurut pendapat saya bahwa peran politik perempuan itu sebuah peluang atau kesempatan untuk perempuan yang turut andil di bagian ranah publik untuk urusan-urusan kemasyarakatan dan kebangsaan. Peran perempuan juga di dunia politik dan kebangsaan jadi perhatian

⁴⁶Ujang Suparman, wawancara dengan penulis, Gedung FKIP Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

di karenakan selama ini dunia politik dan publik menjadi dominasi laki-laki”⁴⁷

Bapak Mukadi Ida Setiawan menyatakan bahwa peran politik perempuan adalah peluang atau kesempatan untuk kaum perempuan yang turut andil dalam ranah publik/ ikut serta dalam lembaga legislatif baik di partai politik maupun urusan-urusan kemasyarakatan. Peran perempuan di dalam dunia politik dan kebangsaan menjadi perhatian karena selama ini dunia perpolitikan dan publik menjadi dominasi kaum laki-laki.

Peran politik perempuan dalam konteks Muhammadiyah dikaitkan dengan politik atau partai politik, Muhammadiyah tidak ada berapiliasi dengan salah satu partai politik apapun, kemudian untuk orang-orang Muhammadiyah baik itu untuk Muhammadiyah maupun Aisyiyah tidak ada batasan untuk aktif partai politik dimana pun tetapi ketika sudah menjadi pengurus salah satu partai politik di tingkat manapun dari pusat sampai ranting harus di lepaskan jabatannya di Muhammadiyah selama menjadi pengurus partai politik. Pendapat tersebut di perkuat Oleh Bapak Thabroni M. Zuhri selaku sekretaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

“Saya melihat peran politik perempuan ini memang sangat dibutuhkan dan memang seharusnya perempuan di ikut sertakan dalam parlemen maupun partai politik biar perempuan itu ikut ke dalam lembaga parlemen atau partai politik gunanya agar aspirasi-aspirasi perempuan ini bisa di dengar dan hak hak perempuan bisa dapat diwujudkan. Terlibatnya perempuan dalam dunia politik agar kesetaraan gender itu tercipta. Selain itu terdapat juga faktor pendorong untuk kaum perempuan yang terjun ke dunia politik karena Muhammadiyah sendiri memberi kesempatan dan kebebasan bagi kader perempuan nya untuk terjun dan berpartisipasi di berbagai bidang termasuk di

⁴⁷Mukadi Ida Setiawan, wawancara dengan penulis, via whatsapp, Kota Bandar Lampung, 15 Oktober 2019.

bidang politik selain itu di berikannya pula kuota sebesar 30% untuk kaum perempuan.”⁴⁸

Menurut penulis sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Thabroni pada saat wawancara peran politik perempuan sangat dibutuhkan dan memang seharusnya perempuan di ikut sertakan dalam suatu parlemen maupun partai politik agar anggota perempuan yang ikut serta dalam lembaga parlemen maupun partai politik dapat mewakili kaum perempuan supaya aspirasi-aspirasi perempuan dapat di dengar dan hak-hak yang belum terwujud dapat segera terlaksanakan. Dengan melibatkan perempuan kedalam dunia politik juga dapat menciptakan adanya kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Selain itu terdapat beberapa faktor pendukung untuk kaum perempuan yang berpartisipasi di dunia politik karena Muhammadiyah memberi kesempatan dan kebebasan bagi kader perempuan yang bergabung di berbagai bidang termasuk didalamnya adalah bidang politik dan di berikan kuota sebesar 30% bagi kaum perempuan.

Hal ini tercantum pada pasal 65 Ayat 1 yang berbunyi: *“Setiap partai politik beserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”*.⁴⁹ Dengan diberikannya ruang dan peluang tersebut maka diharapkan kaum perempuan yang berhasil duduk di parlemen dapat membuat dan menjunjung hak-hak perempuan yang selama ini kurang diperhatikan serta

⁴⁸ Thabroni M. Zuhri, wawancara dengan penulis, Rumah kediaman bapak Thabroni, Sukarame Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

⁴⁹ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 42.

menyangkut pembahasan program dan produk hukum yang menyangkut hak dan kepentingan perempuan.

Terkait dengan ikut sertaan perempuan berperan dalam dunia politik di paparkan pula oleh Bapak Gafri Gewang selaku bendahara Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

“Terjunnya perempuan baik dalam lembaga parlemen seperti anggota legislatif, kepala daerah gak jadi masalah karena di Indonesia tidak ada larangan untuk perempuan menjadi pemimpin tapi kalo di tinjau dari ajaran Islam setinggi apapun jabatan perempuan masih tetap harus kembali pada kodratnya untuk dipimpin oleh kaum laki-laki.”⁵⁰

Ikut sertaan perempuan baik di dalam lembaga parlemen maupun partai politik seperti menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah tidak menjadi masalah dikarenakan tidak ada larangan baik kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin namun jika di kaitan dengan ajaran Islam maka kodrat perempuan haruslah tetap di pimpin oleh kaum laki-laki di se jelaskan yang artinya *“Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”* (QS. AL-Baqarah: 228).

Adapun hadits yang di riwayatkan kepada Al-Bukhari menjelaskan bahwa kaum perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin, *Tidakakan menjadi menang bagi kaum perempuan yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.* Hadits ini berkesan menyudutkan kaum perempuan untuk menjadi pemimpin menurutnya haruslah dipahami secara lebih mendalam tentang latar belakang dari hadits tersebut. Lantas bolehkah

⁵⁰Gafri Gewang, wawancara dengan penulis, via whatsapp, Kota Bandar Lampung, 07 September 2019.

perempuan menjadi kepala negara dan masuk ke ranah politik? Menurut Syamsul Anwal dalam keputusan tidak secara jelas tegas mengatakan bahwa kebolehan perempuan menjadi kepala negara dan masuk ke ranah politik semangat dari seluruh keputusan tersebut tidak melarang perempuan menjadi kepala negara.⁵¹

Dipaparkan pula oleh Bapak Ngatio Haryanto selaku wakil ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung terkait perempuan yang ikut sertaan perempuan dalam berpolitik yang ditinjau dari ajaran Islam

“Perempuan yang ditinjau dari ajaran Islam pada prinsipnya tidak jadi masalah dimana perempuan menjadi pejabat dan pemimpin publik. Perempuan boleh jadi presiden, gubernur, bupati, walikota, camat dan jabatan-jabatan lain. Yang tidak boleh itu kalo jadi pemimpin dalam keluarga. Sehebat apapun perempuan ketika di keluarga yang menjadi pemimpin adalah laki-laki dalam hal jadi suaminya”⁵²

Beliau memaparkan bahwa perempuan yang ikut serta dalam berpolitikan yang di tinjau dari ajaran Islam pada prinsipnya tidak ada masalah kaum perempuan untuk menjadi seorang pejabat dan pemimpin publik. Kaum perempuan boleh menjadi seorang presiden, gubernur, bupati, walikota, camat, lurah maupun jabatan-jabatan lainnya. Yang tidak diperbolehkan jika menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Sehebat apapun kaum perempuan jika didalam anggota keluarganya lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin adalah kaum laki-laki dalam hal menjadi suaminya.

⁵¹Din Syamsudin, *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2005), h. 44.

⁵²Ngatio Haryanto, wawancara dengan penulis, Gedung panti asuhan budimulya, Sukarame Kota Bandar Lampung, 04 September 2019.

Peranan perempuan dalam politik terbagi menjadi dua bagian yaitu peranan secara langsung terjun ke dalam politik praktik pada lembaga-lembaga politik Formal, mulai dari tingkat legislatif adalah DPR dari pusat sampai daerah dan peranan tidak langsung yakni kegiatan yang disalurkan dari rumah tangga dengan turut berperan aktif dalam mengisi kesempatan-kesempatan yang bermanfaat dalam masyarakat⁵³, misalnya mengikuti rapat-rapat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan daemi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.

B. Bentuk partisipasi politik perempuan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

Partisipasi adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut Keith Davis menyatakan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Maka dapat di tarik simpulkan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung dalam pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan seseorang maupun sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak

⁵³Syamsul Anwar, *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2005), h. 49.

langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*).⁵⁴ Pada Kegiatan ini guna mencakup dalam tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, menjadi parlemen, mengadakan hubungan *contacting* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Partisipasi perempuan dalam politik dan parlemen sangat dibutuhkan guna terciptanya kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sehingga kaum perempuan dapat juga merasakan posisi yang sama atau sederajat dengan kaum laki-laki. Selain itu agar hak-hak dan aspirasi-aspirasi perempuan di dengar dan bisa dilaksanakan.

Berdemokrasi telah dibuka oleh pemerintah yaitu salah satunya melalui Undang-undang. Undang-undang adalah salah satu kekuatan bagi kaum perempuan agar dapat berperan lebih dan terlibat dalam pengambilan keputusan dan kaum perempuan harus membawa program-program yang di gulirnya misalnya pada pemilu legislatif lalu pimpinan daerah mendorong kader-kadernya yang berbakat dan berminat di dalam ranah politik untuk berkiprah di lembaga legislatif, dengan cara melakukan program calon pemilih perempuan dan pemilih pemula, menyelenggarakan seminar-seminar dan diskusi tentang politik, bekerjasama dengan berbagai politik dalam rangka mensukseskan legislatif.

Ditegaskan pula oleh KH Ahmad Dahlan bahwa urusan didalam dapur jangan di jadikan sebuah penghalang untuk berkiprah didalam ruang publik

⁵⁴Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Gramedia, 1982), h. 1.

bagi perempuan. Perempuan, yang berkiprah di ruang publik misalnya menjadi kepala daerah, anggota dewan secara tidak langsung perempuan tersebut memberikan tauladan yang baik dalam keluarga sehingga menjadi contoh untuk anak-anaknya. Menurut Maftuchah Yusuf menegaskan bahwa peran perempuan di ruang publik haruslah bertujuan untuk mengangkat derajat dan martabat keluarga.

Perempuan yang berpartisipasi di dalam lembaga politik tidaklah sedikit, mereka tersebar menjadi anggota dewan di berbagai daerah dan tersebar juga di partai politik. Keberadaan mereka diantaranya menjadi anggota legislatif, mulai dari DPR di tingkat daerah sampai ke pusat.

Partisipasi politik perempuan juga diikuti oleh kader-kader perempuan Muhammadiyah, mereka juga ikut andil dalam dunia politik dan parlemen walaupun jumlahnya belum begitu banyak mengingat karena organisasi Muhammadiyah bukan organisasi yang berfokus pada politik dan tidak bekerja sama dengan partai manapun tetapi ada beberapa kader perempuan Muhammadiyah yang terjun ikut berpartisipasi dalam politik maupun parlemen.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ujang Suparman selaku ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung dijelaskan bahwa bentuk partisipasi politik perempuan

“Banyak kok bentuk partisipasi kaum perempuan dalam berpolitik salah satunya ada yang menjadi DPR, DPRD, MPR, Bawaslu, Bupati, Walikota, Camat dan jabatan-jabatan lainnya. Kaum perempuan juga telah menjadi bagian dalam lembaga politik mulai dari tingkatan legislatif, eksekutif dan partai politik. Perlu di ketahui bahwa di Muhammadiyah ketika ada kader-kader Muhammadiyah maupun

calon-calon anggota legislatif dari partai politik tertentu maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya di Muhammadiyah”⁵⁵

Kini perempuan banyak yang sudah terjun ke dunia politik bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam berpolitik di antaranya menjadi seorang DPR, DPRD, MPR, Bawaslu, Bupati, walikota dan jabatan-jabatan lainnya. Perempuan telah menjadi bagian didalam lembaga politik mulai dari tingkatan legislatif dan partai politik. Organisasi Muhammadiyah jika ada kader-kader Muhammadiyah maupun calon-calon anggota legislatif yang maju mencalonkan diri untuk duduk di kursi parlemen maupun duduk di partai politik maka harus melepaskan jabatannya di Muhammadiyah.

Peran politik perempuan pula secara tidak langsung peran perempuan di bidang sosial yang sangat cukup besar dalam berkontribusi memecahkan permasalahan di masyarakat. Peranan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di ruang publik adalah sebuah harapan agar lahir kebijakan yang sensitif terkait dengan gender sehingga hasil dari kebijakan tersebut benar-benar dapat dirasakan secara adil kepada masyarakat. Laki-laki dan perempuan bukan lawan namun patner dalam mengatur kehidupan.

Sebagaimana menurut Parwoto mengenai unsur-unsur peran politik perempuan sebagai berikut:⁵⁶

1. Keterlibatan Dalam Keputusan

Dalam peran keterlibatan dalam keputusan sangat digunakan agar pemimpin tidak merasa kesulitan dalam membuat sebuah

⁵⁵Ujang Suparman, wawancara dengan penulis, Gedung FKIP Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

⁵⁶Parwoto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 28.

keputusan tanpa melibatkan bawahannya, maka keterlibatan ini dapat formal seperti menggunakan kelompok dalam mengambil keputusan atau informal seperti permintaan akan gagasan-gagasan.

Peran politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah yaitu bagaimana peran perempuan di lihat dari Muhammadiyah terutama melibatkan dalam setiap agenda Muhammadiyah. Hal ini terlihat dalam setiap kegiatan yang ada pada Muhammadiyah serta saat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut persyarikatan Muhammadiyah.

Selanjutnya hal yang menarik ketika menyatakan pengambilan dalam keputusan, dimana pada saat sidang suatu agenda pendapat perempuan. Tentunya sangat memberikan kesempatan kepada perempuan agar dapat menyatakan pendapatnya dalam setiap pengambilan keputusan di Muhammadiyah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Ujang Suparman selaku ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung menyatakan sebagai berikut :

“Tentu iya, karena perempuan juga termasuk dalam bagian dari Muhammadiyah sehingga kita pun selalu menjunjung tinggi harkat martabat dan memperhatikan terutama dalam pengambilan keputusan walaupun terkadang dari kami masih merasa kesulitan untuk bisa bicara secara mutlak dalam proses pengambilan keputusannya terlebih lagi kami berkedudukan pada jajaran di kota, namun secara keseluruhan kita akan melibatkan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan”⁵⁷

⁵⁷Ujang Suparman, wawancara dengan penulis, Gedung FKIP Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

Dalam pengambilan keputusan Bapak Ujang Suparman selaku ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan memang sudah seharusnya di ikut sertakan karena perempuan juga termasuk kedalam bagian dari Muhammadiyah Kota Bandar Lampung sehingga dalam Muhammadiyah pun selalu menjunjung tinggi harkat martabat dan memperhatikan terutama dalam pengambilan keputusan, meskipun masih merasakan kesulitan dalam proses pengambilan keputusan secara mutlak namun terkait secara keseluruhan Muhammadiyah tetap mengikut sertakan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan.

Pendapat tersebut di perkuat oleh Bapak Ngatio Haryanto selaku wakil ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

“Ya, kami Muhammadiyah selalu memberikan porsi khusus untuk kaum perempuan. Kebijakan serta arah gerakan Muhammadiyah didasarkan atas keseluruhan pendapat dari semua anggota persyarikatan Muhammadiyah dalam setiap rapat serta musyawarah yang ada, sehingga semua dapat menyatakan pendapatnya, maka dari itu perempuan harus diberikan porsi khusus”⁵⁸

Dari pernyataan di atas bahwa didalam sebuah pengambilan keputusan, keterlibatan pada kaum perempuan sangat di perhatikan baik dalam setiap sidang, rapat harian atau dalam menentukan arah gerakan Muhammadiyah. Perempuan juga diberikan porsi khusus dalam setiap pengambilan keputusan yang bersifat internal pada Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

⁵⁸Ngatio Haryanto, wawancara dengan penulis, Kantor Panti Asuhan Budimulya, Sukarame Kota Bandar Lampung, 04 September 2019.

Dilihat dari aspek gender pendapat di atas, hal tersebut bisa dikaitkan dengan peran politik perempuan dalam sebuah organisasi. Peran ini sejalan dengan gerakan kesetaraan gender yang sedang di perbincangkan. Perempuan Muhammadiyah terus meningkatkan perannya didalam sebuah pengambilan keputusan serta berperan aktif pada setiap diadakannya agenda dan kegiatan Muhammadiyah. Kedudukan perempuan dalam organisasi Muhammadiyah diberikan sebuah dampak bagi kaum perempuan Muhammadiyah untuk masuk dalam kepengurusan Muhammadiyah tanpa adanya rasa kurang percaya diri.

2. Bentuk Kontribusi

Bawahan memberikan idenya, tenaganya dan gagasannya bagi kemajuan kedepannya terhadap atasannya.⁵⁹

Perempuan Muhammadiyah memiliki peran dalam pengambilan keputusan serta berperan aktif dalam kegiatan Muhammadiyah, Adapun bentuk kontribusi bagi perempuan yang terjun ke dunia politik memiliki sebuah ide atau gagasan-gagasan untuk kemajuan kedepannya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ngatio Haryanto selaku wakil ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

“Bentuk kontribusi perempuan dalam Muhammadiyah itu ada kok seperti kan di dalam Muhammadiyah itu khusus perempuan nya ada yang nama nya Aisyiyah, jadi dengan di bentuknya aisyiyah itu perempuan-perempuan yang ada dalam organisasi Muhammadiyah maupun warga Muhammadiyah bisa ikut berkontribusi dalam kemajuan Muhammadiyah itu sendiri,

⁵⁹Parwoto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 28.

Aisyiyah juga tidak kalah dengan kaum laki-laki nya banyak juga kegiatan-kegiatan maupun kontribusi yang berhasil dilakukan aisyiyah seperti adanya kegiatan di bidang kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi, akan tetapi Aisyiyah dalam bidang politik tidak berkonsentrasi dikarenakan Muhammadiyah lebih berfokus kepada kegiatan-kegiatan sosial. Tujuan dari Muhammadiyah yaitu tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya⁶⁰

Adanya bentuk kontribusi perempuan dalam Muhammadiyah seperti di dalam Muhammadiyah khususnya perempuan disebut dengan nama Aisyiyah, terbentuknya Aisyiyah perempuan-perempuan dalam organisasi Muhammadiyah maupun warga Muhammadiyah bisa ikut serta berkontribusi dalam kemajuan Muhammadiyah. Aisyiyah juga tidak kalah bersaing dengan kaum laki-laki, banyak kegiatan-kegiatan maupun kontribusi yang berhasil dilakukan oleh Aisyiyah seperti dengan diadakannya suatu kegiatan pada bidang kesehatan, sosial, pendidikan maupun ekonomi. Namun didalam bidang politik Aisyiyah tidak berkonsentrasi di karenakan lebih berkontribusi di bidang-bidang sosial. Tujuan dari Muhammadiyah ialah tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Gerakan kader perempuan Muhammadiyah di bidang kesehatan yaitu dengan membangun Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), sekolah bidan atau akademi keperawatan serta beberapa klinik dan rumah sakit, kini kaum perempuan telah memiliki klinik dan rumah

⁶⁰Ngatio Haryanto, wawancara dengan penulis, Kantor Panti Asuhan Budimulya, Sukarame Kota Bandar Lampung, 11 September 2019.

sakit lebih dari 125 yang tersebar di berbagai daerah. Jika jumlah itu digabungkan dengan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, maka bisa menjadi 500 unit lebih. Disamping sebagai aset, itu juga merupakan modal sosial Muhammadiyah untuk kepentingan dakwah keumatan dan kebangsaan.⁶¹

Gerakan kader kaum perempuan Muhammadiyah selain di bidang kesehatan juga terdapat di bidang pendidikan dengan mendirikan dari kelompok bermain dan taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi. Sekarang terdapat lebih dari 20 ribu unit taman kanak-kanak yang dibangun oleh kader perempuan. Kesejahteraan Sosial, pembinaan dengan cara memberikan santunan kepada anak yatim, pembinaan anak asuh dan pemberian bantuan pendidikan.

Kader perempuan di Muhammadiyah dalam gerakan kesehatan dan sosial mereka mempraktikkan dalam (QS Al-Ma'un ayat 1-7). Dengan melalui Al-Maun lahirlah filantropi Islam dalam bentuk rumah sakit, panti asuhan, poli klinik serta usaha-usaha pemberdayaan masyarakat yang membawa kemajuan hidup lahir dan batin. Al-maun adalah teologi pembebasan bagi kaum dhu'afa mustad'aflin yang lebih dan tertindas. Al-Maun membuktikan bahwa Islam sebagai agama amaliah yang mencerahkan yaitu membebaskan, memberdayakan dan

⁶¹Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga 'Aisyiyah'*, (Yogyakarta: PP Aisyiyah, 2002), h. 9.

memajukan kehidupan mereka yang tidak beruntung dalam kehidupannya.

Gerakan kader perempuan Muhammadiyah di bidang Ekonomi adanya Pembinaan taraf hidup dan pendapatan keluarga, dalam kegiatan ini perempuan dengan mendirikan sebuah Badan Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA), UMKM, Koperasi, Sekolah Wirausaha Aisyiyah. Pada pembinaan Muallaf atau Dhuafa yaitu pembinaan pada orang-orang atau masyarakat yang lemah iman dan lemah ekonomi. Pada intinya kehadiran kaum perempuan berada dalam perspektif Islam berkemajuan, dengan membawa misi rahmatan lil'alam. Namun dalam bidang politik kaum perempuan kurang berkontribusi dikarenakan kaum perempuan Muhammadiyah lebih berfokus ke bidang sosial, sehingga kuota 30% belum terpenuhi. Dijelaskan pula oleh Bapak Thabroni M. Zuhri selaku sekretaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung bahwa

“Kurang nya kontribusi perempuan ini di bidang politik membuat kuota yang sudah di tetapkan sebanyak 30% kurang memenuhi jikapun terdapat perempuan yang ikut serta dalam parlemen maupun partai politik hanya sebagai formalitas saja yang penting ada perempuan yang ikut serta”⁶²

Kurangnya kontribusi perempuan di bidang politik membuat kuota yang telah di tetapkan sebanyak 30% belum terpenuhi, perempuan yang ikut serta dalam parlemen maupun partai politik hanya formalitas sebagai keterwakilan perempuan saja.

⁶²Thabroni M. Zuhri, wawancara dengan penulis, Rumah kediaman bapak Thabroni, Sukarame Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

3. Organisasi Kerja

Terdiri dari beberapa orang yang disebut atasan sedangkan sekelompok orang disebut bawahan yang bekerja sama dengan menempatkan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan (berbagi peran).

Hasil wawancara dengan Bapak Ujang Suparman selaku ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

“Dalam organisasi kerja Muhammadiyah mengikut sertakan kaum perempuan dalam menduduki suatu jabatan di dalam organisasi Muhammadiyah agar kaum perempuan dapat setara dengan kaum laki-laki serta gagasan dan usulan mereka dapat di dengar dan dilaksanakan akan tetapi dalam organisasi kerja hanya sedikit yang di ikut sertakan karena perempuan itu dirasa kurang optimal soalnya kan selain mengurus tugas di organisasi mereka juga kan berperan sebagai ibu rumah tangga jadi perempuan itu tidak fokus untuk menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka”⁶³

Organisasi Muhammadiyah mengikut sertakan kaum perempuan dalam menduduki suatu jabatan yang ada di dalam organisasi Muhammadiyah agar kaum perempuan dapat setara dengan kaum laki-laki serta memiliki gagasan-gagasan, ide dan usulan agar dapat tersampaikan dan dilaksanakan. Namun di dalam sebuah organisasi Muhammadiyah hanya sedikit yang di ikut sertakan kaum perempuan, karena kaum perempuan belum optimal dalam tanggung jawab mereka mengingat bahwa tugas kaum perempuan tidak hanya dalam organisasi saja melainkan mereka memiliki tanggung jawab sebagai

⁶³Ujang Suparman, wawancara dengan penulis, Gedung FKIP Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

ibu rumah tangga dengan bertugas utama yaitu melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya dan melayani suami.

Keputusan perempuan untuk berpolitik tidak akan menjadi sebuah masalah untuk keputusan perempuan yang masuk ke ranah politik, sepanjang perempuan mempunyai bakat dan minat serta kemampuan yang sangat memadai. Tentu saja sebagaimana dengan yang lain bahwa kaum perempuan dalam berpolitik harus menjaga etika dan rambu-rambu ajaran Islam

Peran sosial perempuan saat ini pun sudah cukup baik, sudah banyak perempuan yang tampil di dalam ruang publik baik dalam menduduki posisi penting di ruang publik maupun yang ikut dalam lembaga legislatif dan partai politik. Namun harus ditingkatkan peran serta perempuan di dunia politik.

Muhammadiyah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk berpolitik. Sejak 1912 Muhammadiyah sudah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk tampil mengurus masyarakat dengan membentuk organisasi yang bernama Aisyiyah. Sekarang tentu peran perempuan di Muhammadiyah lebih luas.

Peneliti mewawancarai Bapak Gafri Gewang selaku bendahara pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, beliau mengatakan bahwa:

“Namun untuk Pimpinan Persyarikatan, Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha dan institusi-institusi lainnya berada di persyarikatan kalo ada anggota pimpinan atau fungsionaris yang menjadi anggota tim sukses partai politik atau calon-calon anggota legislatif dari partai politik tertentu, harus di non aktifkan dari jabatannya sampai selesainya kegiatan pemilu”⁶⁴

Kepada Pimpinan Persyarikatan, Majelis, Lembaga, Organisasi otonom, Amal Usaha maupun institusi-institusi lainnya yang berada didalam lingkungan persyarikatan apabila ada seorang anggota pimpinan ataupun fungsionaris yang menjadi anggota tim sukses pada suatu partai politik dan calon-calon anggota legislatif dari partai politik tertentu maka yang bersangkutan harus dinonaktifkan dari jabatannya sampai kegiatan pemilunya terselesaikan.

4. Penetapan Tujuan

Berdasarkan rencana strategi yang sudah ditetapkan baik diantara atasan maupun bawahan yang memiliki misi-misi yang sesuai dengan jangka waktu tertentu sehingga terciptanya sebuah tujuan tersebut.

Muhammadiyah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada perempuan untuk berpolitik sejak awal tahun 1912, Muhammadiyah ikut tampil dalam kepengurusan bermasyarakat dengan membentuk organisasi yang bernama Aisyiyah. Sekarang tentu peran perempuan di Muhammadiyah sudah lebih luas. Tujuan

⁶⁴Gafri Gewang, wawancara dengan penulis, via whatsapp ,Kota Bandar Lampung, 07 September 2019.

organisasi Muhammadiyah yang di jabarkan oleh Bapak Ujang Suparman selaku ketua Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

“ Memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk ikut serta kedalam bagian ruang publik untuk menghimpun, membina dan menggerakkan potensi masyarakat Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa organisasi Muhammadiyah ini berasaskan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As Sunah. Muhammadiyah juga di tuntut perannya untuk mencapai tujuan yakni terciptanya masyarakat yang utama yang diridha oleh Allah SWT. Artinya dalam setiap aktifitas gerakan Muhammadiyah tidak bisa terlepas dari kondisi kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan agenda yang paling utama”⁶⁵

Dalam memberikan kesempatan kaum perempuan agar ikut kedalam bagian ruang publik untuk menghimpun, membina dan pergerakan besar masyarakat Islam dalam meningkatkan suatu peran sebagai kader untuk tercapainya tujuan Muhammadiyah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa organisasi Muhammadiyah ini berasaskan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As Sunah. Muhammadiyah berperan dalam mencapai tujuan yakni supaya terciptanya masyarakat yang di ridha oleh Allah SWT. Dengan artinya dalam setiap aktifitas gerakan organisasi Muhammadiyah tidak akan terlepas dari kondisi kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan agenda yang paling utama.

⁶⁵Ujang Suparman, wawancara dengan penulis, Gedung FKIP Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari melakukan wawancara dengan mendengar serta menganalisa dari beberapa fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, terkait masalah mengenai peran politik perempuan dalam pandangan fungsionaris muhammadiyah Kota Bandar Lampung lalu dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung terhadap peran politik perempuan sudah terlaksana cukup baik dan perempuan diikut sertakan keranah politik agar anggota perempuan dapat mewakili kaum perempuan supaya aspirasi-aspirasi perempuan dapat di dengar dan hak-hak perempuan yang belum terwujud dapat terlaksanakan asalkan kaum perempuan mampu membagi perannya dalam keluarga sebagai Istri dan Ibu maupun dalam ruang publik. Dengan melibatkan perempuan keranah politik juga menciptakan kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Perempuan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung sudah banyak yang tampil didalam ruang publik baik dalam menduduki posisi penting di ruang publik maupun yang ikut dalam lembaga legislatif.

2. Bentuk Partisipasi peran politik perempuan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung aktif di dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Namun untuk kursi legislative yang seharusnya diberikan kuota sebesar 30% masih belum di manfaatkan dengan baik. Pada kenyataannya keikutsertaan perempuan dalam ranah politik hanya sebagai formalitas.

B. Rekomendasi

Peran politik perempuan dalam pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung merupakan awal untuk mengkritisi maupun mengevaluasi. Dalam menganalisa peristiwa-peristiwa yang terjadi dari pengalaman yang mereka alami.

Penelitian skripsi ini terfokus pada politik perempuan yaitu fungsionaris muhammadiyah Kota Bandar Lampung :

1. Dalam bidang politik, Muhammadiyah harus tetap konsisten kepada khittah perjuangan dari awal bahwa Muhammadiyah bukan berpolitik praktis yang hanya mendatangkan kemadharatan dari pada kemaslahatannya dalam jangka panjang. Muhammadiyah lebih aktif menempatkan diri sebagai *civil socaity* yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik pemerintahan agar tujuan dari Muhammadiyah tercapai.
2. Mewajibkan setiap partai politik perempuan untuk melakukan berbagai upaya agar peningkatan partisipasi perempuan dalam

lembaga legislatif dapat memenuhi ketentuan target jumlah 30% keanggotaan perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Referensi Buku:

- Ahmadi, Abu, 1982, *Psikologi Sosial*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Aisyiyah, Pimpinan Pusat, 2002, *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga 'Aisyiyah'*, Yogyakarta: PP Aisyiyah.
- Anwar, Syamsul, 2005, *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Arikunto, Suharsimi, 2008, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara.
- Budiardjo, Miriam, 2006, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Gramedia.
- Faisal, Sanapiah, 2010, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathoni, Abdurrahman, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendropuspito, 1989, *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hikmawati, Fenti, 2017, *Metodologi Penelitian*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Linton, Ralph, 1984, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mardis, 2004, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Miswanto, Agus, 2012, *Sejarah Islam dan Kemuhimmadiyahan*, Magelang: P3SI UMM.
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Siti Musdah, 2008, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Yogyakarta: Kibar Press.

M.S, Klean, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma.

Parwoto, 1997, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

Remiswal, 2013, *Menggugat Partisipasi Gender di Lingkungan Komunikasi Lokal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Salim, peter dan Yeni Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia, Kontemporer, edisi pertama*, Jakarta: Modern English Press.

Sarwono, Sarlito Wirawan, 2003, *Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Soetjipto, Ani Widayani, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas.

Sugiono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV alfabeta

Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana, 2010, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsudin, Din, 2005, *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah.

Sumber Jurnal:

Joeseof, Soehandy, 1997, *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Lahan Terkendali di Kawasan Pinggiran Kota “Studi kasus: Desa Ciboga, Kab Tangerang”*, Jabar: Tesis.

Pasya, Gurniwan K, *Peranan Wanita Dalam Kepemimpinan dan Politik (Jurnal Wanita)*.

Sumber On-line,

Annisa Fitri Dwi Mardiah, “*Peranan Wanita Dalam Politik Menurut Undang-undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu*” (On-line), tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id> (10 Desember 2018)

Martoyo, “*Pemberdayaan Politik Perempuan Perspektif Muhammadiyah*” (On-line) tersedia di: <http://digilib.uin-suka.ac.id/25621/> (14 Desember 2018)

Nuni Silviana, “*Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif*” (On-line), tersedia di: <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/SKRIPSI.pdf> (15 Desember 2018)

Sri Sumarni Sjahril, “*Politik Perempuan di Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)*” (On-line), tersedia di: <http://repository.uin-alauddin.ac.id/1829/1/Sri%Sumarni%20Sjahril.pdf> (16 Desember 2018)

Sumber Wawancara:

Gafri Gewang, wawancara dengan penulis, via whatsapp, Kota Bandar Lampung,
07 September 2019.

Mukadi Ida Setiawan, wawancara dengan penulis, via whatsapp, Kota Bandar
Lampung, 15 Oktober 2019.

Ngatio Haryanto, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Sukarame
Kota Bandar Lampung. 11 September 2019.

Thabroni M. Zukri, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Sukarame
Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

Ujang Suparmann, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Kota Bandar
Lampung, 28 Agustus 2019.



DOKUMENTASI

Gambar 1.1

Wawancara bersama Bapak Ujang Suparman



Gambar 1.2

Wawancara bersama Bapak Thabroni M. Zuhri



Gambar 1.3

Wawancara Bersama Bapak Ngatio Haryanto



1.4

Lambang Muhammadiyah

